

Geostrategi Tiongkok Terkait Gerakan TIM (*Turkestan Islamic Movement*) di Xinjiang Pada Periode 2013-2019

Hilmi Fadlurrohman¹
Arin Fithriana²

Abstract

The security of all forms of both internal and external threats is the main focus of each country. Insurgency movement conducted by the TIM (Turkestan Islamic Movement) in Xinjiang became the focus of the Chinese government in maintaining the security stability of its country. Xinjiang is the most important connecting area to the countries of central Asia One of the special Administrative regions in China (Xinjiang-Uighur Autonomous Region). However, the gap between ethnic groups in Xinjiang made an insurgency/terrorisme movement and made the special Autonomy area threatened by ethnic conflicts that indicated involvement with the extremism movement encouraged the Chinese government to create a strategy for tackling the problem. China's geostrategy in relation to such problems is carried out with counter-insurgency utilizing military and paramilitary forces such as the people's Liberation Army, Paramilitary: The People's Armed Police (PAP), Paramilitary: Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), Paramilitary: The People and The Police. This action was undertaken to prevent the widespread movements of the extremism of other cantilas. Another strategy is the Society centric war by rebuilding government institutions with the support of grassroots communities.

Keywords: *insurgency, Turkistan Islamic Movement (TIM), Uyghur, Xinjiang*

Pendahuluan

Xinjiang merupakan wilayah pemerintahan Tiongkok yang berbatasan langsung dengan Mongolia, Afghanistan, Pakistan dan Pakistan India dan dengan tiga negara Asia Tengah yang dulu merupakan bagian dari Uni Soviet yaitu Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Rusia (Maizland, 2019). Wilayah Xinjiang juga memiliki cadangan batu bara dan gas alam terbesar di Tiongkok. Sumber daya alam sebesar ini dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan Tiongkok. Wilayah ini mencakup kira-kira seperenam dari total wilayah negara dan terkenal dengan cadangan minyak dan gasnya

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur. Email: hilmifad7@gmail.com

² Dosen tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur

yang melimpah. Xinjiang juga merupakan jalur BRI (Belt and Road Initiative) dan merupakan wilayah penghubung paling penting untuk penghubung dengan negara-negara Asia Tengah, dengan dasar tersebut Xinjiang menjadi salah satu wilayah Administratif khusus di Tiongkok (Xinjiang-Uighur Autonomous Region). Xinjiang merupakan tempat tinggal dari 13 etnis, dengan enam etnis yang beragama Islam, dengan etnis Uighur yang berbahasa turki, sebagai etnis terbesar yang beragama Islam. Sejak ditetapkannya Xinjiang sebagai daerah otonomi khusus pada tahun 1955, terjadi berbagai kasus konflik etnis antara etnis Uighur dengan etnis Han yang merupakan etnis mayoritas Tiongkok (Hann, 2002: 57).

Kesenjangan antar etnis yang terjadi antara Etnis Han dan Uighur membuat organisasi hak asasi manusia mengamati bahwa manfaat ekonomi dari ekstraksi dan pembangunan sumber daya sering dinikmati secara tidak merata oleh suku Tiongkok Han yang merupakan suku mayoritas di wilayah Tiongkok, dan suku Uighur semakin terpinggirkan, Suku Uighur dapat dikatakan oleh Organisasi hak asasi manusia tidak mendapatkan keadilan yang selayaknya sehingga menimbulkan banyak potensi pemikiran radikalisme untuk masuk dengan mudah (Yuxin 2008: 131), Kesenjangan antar etnis ini dimanfaatkan oleh gerakan TIM (Turkestan Islamic Movement) yang berada di Xinjiang.

Peristiwa 11 september 2001, yaitu pada saat pesawat komersil Amerika Serikat dibajak oleh teroris Al-Qaeda yang penyerangan terror tersebut dikepalai oleh Osama Bin Laden dan berhasil menghancurkan menara *World Trade Center* (WTC) di kawasan Wall Street, New York. Pemerintah Tiongkok melihat ini sebagai suatu ancaman yang dapat meluas dan menimpa seluruh Negara, tidak hanya Amerika dan wilayah barat lainnya, dengan pandangan tersebut, Tiongkok mengambil tindakan yang bersifat preventif dengan perspektif geostrategis untuk menjaga keamanan kepentingan negara seluruh wilayah Tiongkok terutama Xinjiang (Reed dan Raschke, 2010). Pemerintah Tiongkok berasumsi ancaman terorisme dari negara barat akan meluas ke wilayah Tiongkok (Xu dan Fletcher, 2014), dan berakibat gerakan TIM terkonfirmasi sebagai ancaman insurgensi yang dapat menghancurkan kedaulatan wilayah Xinjiang, dan TIM ada kaitanya dengan fundamentalisme muslim di xinjiang.

Gerakan TIM ini terinspirasi dengan gerakan terorisme berbasis Timur Tengah seperti ISIS dan Al-Qaeda, dugaan ini semakin diperkuat dengan adanya rilis video secara *online* berdurasi satu jam yang berisi tentang kemampuan menembak serta kepemilikan senjata seperti AK47, M-16, serta bahan peledak dan rudal kecil (Pereire, 2006). Menanggapi hal tersebut, Duta besar Suriah untuk Tiongkok menyatakan bahwa ada lebih dari 5000 orang masyarakat Uighur yang bergabung dalam kelompok radikalisme (Blanchard, 2017), Data yang diperkirakan pemerintah Tiongkok lebih sedikit dan berbeda jauh dari pernyataan duta besar Suriah terkait hal tersebut. Pemerintah Tiongkok harus lebih mengawasi dan mengimplementasikan Geostrategi di wilayah Xinjiang. Tiongkok merupakan salah satu negara dengan power yang kuat, dalam arti menurut konsep Geostrategi adalah dengan Power negara Tiongkok yang kuat harus dengan bijak memilih wilayah yang memang membutuhkan pengaruh dan kekuatan Tiongkok dengan mempertimbangkan aspek geografis yang jelas untuk kebijakan luar negeri mereka di wilayah Xinjiang.

Tiongkok mencari segala macam cara untuk melindungi wilayah Xinjiang dari invasi dan serangan dari insurgensi TIM, dan batas negara adalah ukuran keamanan teritorial. Ketika perbatasan negara terancam atau tidak stabil, negara harus memusatkan upayanya pada keamanan wilayah tersebut dan tidak dapat mengeluarkan kebijakan luar negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan negara tersebut. Sumber daya diplomatik, ekonomi, dan militer harus dialihkan untuk perlindungan perbatasan (Grygiel, 2006: 36). Fokus dari Tiongkok adalah menghancurkan dan mencegah insurgensi berada di wilayah Xinjiang yang memiliki potensi besar keberadaan TIM.

TIM menggunakan cara Insurgensi untuk membuat perang asimetris, dalam arti TIM membutuhkan waktu yang lama untuk menyebarkan paham radikalisme di Xinjiang dan tidak harus berperang secara langsung dengan militer Tiongkok, dengan memanfaatkan waktu dengan membuat perang berkepanjangan, tanpa harus menguasai wilayah namun berada dimana-mana baik karena mobilitas yang tinggi maupun luasnya jaringan organisasi, dapat merebut dukungan masyarakat (dalam dan atau luar negeri) dan alasan yang tepat untuk melegitimasi perlawanan mereka menggunakan media apapun untuk penyebaran pemikiran radikal (Baylis, 2002), Tujuannya adalah untuk membuat gerakan tersebut sulit dideteksi, dan membuat pemerintahan Tiongkok menjadi lemah dan kehilangan legitimasi Masyarakat Xinjiang terutama Etnis uighur dan melemahkan Geostrategi Tiongkok.



Gambar 1. CPEC (*The Tiongkok-Pakistan Economic Corridor*)
Sumber: politico.eu, 2017

Geostrategi Tiongkok yang didasarkan pada Xinjiang sebagai salah satu daerah Otonomi Khusus yang mencakup pada faktor daerah perbatasan yang menghubungkan jalur Belt and Road Initiative yang salah satunya menghubungkan Pakistan dan Xinjiang melalui CPEC (*The Tiongkok-Pakistan Economic Corridor*) dari kota Kashgar di Xinjiang, kemudian dari sumber daya alam hal paling crucial adalah penemuan ladang gas yang menyimpan cadangan 115,3 miliar meter kubik yang ditemukan di lembah Tarim yang merupakan daerah otonom Xinjiang. Media Tiongkok mengkonfirmasi hal tersebut melalui Perusahaan yang mengelola ladang minyak tersebut (Republika, 2019). Sumberdaya alam yang melimpah membuat Xinjiang menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar untuk Tiongkok, dan Jalur BRI yang menghubungkan dari wilayah Xinjiang dan menuju wilayah Asia Tengah. Wilayah Asia Tengah dan Tiongkok membuat pengelompokan bernama "Shanghai Five" di Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan, dan berevolusi menjadi SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) (Clarke, 2010: 213). Berbatasan dengan berbagai negara mempunyai bisa menjadi dua makna untuk Tiongkok sendiri, yaitu dimana keadaan menjadi untung buat Tiongkok namun memiliki Tanggung jawab yang besar untuk menempatkan Geostrategi di Tiongkok

Pembahasan

Geostrategi Tiongkok mengacu pada bagaimana cara Tiongkok mempertahankan kedaulatan daerah Xinjiang dari segala macam hambatan, Namun permasalahan internal Xinjiang yang berupa terdapatnya gerakan separatisme yang mengatas namakan Etnis Uighur dengan nama organisasi TIM (*Turkestan Islamic movement*), Karena tujuannya secara politis adalah untuk membebaskan Xinjiang dari kedaulatan atas pemerintah Tiongkok dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran radikal melalui banyak media yang bisa dipublikasikan.

Pada periode 2013-2019, pemerintah Tiongkok menggunakan Geostrategi sebagai alat utama dalam mempersempit kesenjangan ekonomi dan sosial antara Han dan orang-orang minoritas, berharap untuk meyakinkan orang-orang minoritas bahwa mereka akan mendapat manfaat lebih dari integrasi dan kerja sama dalam multi-etnis Bangsa Tiongkok. Peningkatan kesenjangan dan relatif kurang berkembang telah memicu ketidakpuasan, protes dan keresahan, kepentingan negara sendiri dalam keamanan dan stabilitas yang menopang kebijakan dan proyek preferensial. Keresahan sporadis yang menjadi ciri beberapa wilayah minoritas dalam tiga dekade terakhir menunjukkan bahwa, bahkan jika manfaat ekonomi dari kebijakan preferensial mengalir ke dalam komunitas minoritas, kepahitan terhadap dominasi Han mungkin masih muncul jika pembangunan ekonomi bertambah secara asimetris demi Han. Selain itu, jika keputusan dasar mengenai tunjangan fiskal pusat, subsidi khusus, alokasi sumber daya, persetujuan proyek dan pengaturan peraturan dibuat oleh pemerintah pusat dan cabang-cabang lokalnya yang lebih rendah, minoritas mungkin masih merasa bahwa mereka sendiri memiliki kedaulatan atas etnis mereka sendiri (Luft, 2016: 68-75).

Tujuan jangka panjang yang ingin diraih dalam Geostrategi Tiongkok yaitu kedaulatan, modernitas, dan stabilitas. Ancaman Teror dan penyebaran pemikiran radikalisme di Tiongkok merupakan bagian dari insurgensi sehingga hal ini berkaitan langsung dengan kedaulatan yang sangat dijaga oleh Tiongkok. Insurgensi Xinjiang yang tujuan tertingginya adalah melemahkan pemerintah Tiongkok dan serangan langsung terhadap integritas teritorial Tiongkok dan upaya Tiongkok untuk mempertahankan kesatuan wilayahnya. Selain itu, jika dilihat dari segi stabilitas, insurgensi sangat mengancam karena dapat berakibat fatal terhadap stabilitas internal negara dan masyarakatnya. Jika Xinjiang dibiarkan bergolak, daerah-daerah lain yang juga ingin memisahkan diri dari Tiongkok akan melihatnya sebagai preseden untuk turut berjuang dan menimbulkan kekacauan di Tiongkok.

Implementasi geostrategi Tiongkok dalam menanggulangi tindak separatisme juga dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan negara-negara sekitar. Hal ini terlihat dengan didirikannya SCO (*Shanghai Cooperation Organization*). Shanghai Cooperation Organization merupakan suatu organisasi internasional berbasis regional yang beranggotakan Tiongkok, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan serta Uzbekistan sebagai negara pendiri, India dan Pakistan sebagai anggota penuh baru, serta Mongolia dan Iran sebagai negara pengamat, serta negara dialog yaitu Azerbaijan, Kamboja, Armenia, Nepal, Turki, dan Sri Lanka. Organisasi ini mengatur kerjasama para negara anggota dalam berbagai sektor seperti pada sektor politik, militer, sosial, pendidikan, ekonomi, serta energi (De Haas, 2007: 5). Tujuan utama dari SCO adalah untuk menguatkan rasa percaya antar negara anggota, memastikan para negara anggota untuk bekerja sama dalam berbagai sektor strategis demi menjaga perdamaian dan mengurangi potensi konflik antar negara anggota sehingga tercipta stabilitas regional dan kondisi politik dan ekonomi yang terorganisir. Organisasi ini memiliki dua struktur permanen, Sekretariat Utama SCO yang berlokasi di Beijing, Tiongkok dan Komite Eksekutif Anti Teroris Regional di Tashkent, Uzbekistan.

Pada fase terbentuknya *Regional Antiterrorism Structure* (SCO-RATS) di Tashkent, Uzbekistan pada tahun 2004, yang mencakup penanganan preventif terorisme, pertukaran informasi mengenai ancaman terorisme, dan penyaranan mengenai kebijakan kontraterorisme (Weitz, 2006: 15). Berkaitan dengan geostrategi Tiongkok terkait TIM, pemerintah Tiongkok mendasari penanganan TIM pada kesepakatan di fase kedua dari SCO yang berfokus pada pemberantasan terorisme, ekstrimis, dan separatisme sebagai masalah utama keterkaitan terhadap stabilitas regional. Insurgensi TIM memang tidak dikaitkan dengan dengan kategori SCO-RATS, namun Insurgensi yang dilakukan TIM mencakup strategi yang diterapkan oleh kelompok terorisme, ekstrimis, dan separatisme. Insurgensi TIM di Xinjiang mencakup ketiga aspek tersebut dan dapat menyebabkan dampak atau resiko yang sama bahkan lebih buruk jika TIM mulai meluas pengaruhnya.

Insurgensi yang berada di Xinjiang merupakan manifestasi selain dalam bentuk Terorisme, Dalam arti memiliki macam-macam bentuk yang berkaitan dengan Insurgensi seperti bentuk demonstrasi publik dan kekerasan massa. Penargetan dengan korban yang akan menjadi sasaran adalah masyarakat dengan Etnis selain suku Uighur, dilihat dari sisi Sejarah berakar pada permasalahan politik yang menyebabkan Tiongkok dianggap terlalu menekankan kebijakan tertentu terhadap wilayah Xinjiang. Insurgensi dan Terorisme adalah dua hal yang berbeda namun untuk gerakan separatisme TIM di Xinjiang ini harus dipandang dalam dua sisi yaitu TIM bisa dikatakan Terorisme merupakan salah satu strategi TIM yang digunakan dalam insurgensi di Xinjiang. Pemerintah Tiongkok dalam perspektifnya beranggapan TIM memiliki kaitan dengan kelompok jaringan teroris lainnya seperti Al-Qaeda yang membuat permasalahan insurgensi ini menjadi ancaman kedaulatan wilayah Xinjiang.

Salah satu strategi Tiongkok melawan gerakan TIM dengan doktrin yang mekankan pada agar masyarakat xinjiaang beretnis Uighur mengerti strategi perang Tiongkok melawan insurgensi (*Counter-Insurgency*). Penerapan doktrin yang dilakukan Tiongkok yaitu berfokus menekankan pada hard power, yaitu *strike hard maximum pressure*, tetapi juga bersifat bertahap, yakni menurunkan level penggunaan hard power ketika insurgensi telah berhasil dikendalikan dan dilengkapi dengan pendekatan dari bawah yang ditekankan pada pendekatan yang membentuk ulang pemikiran masyarakat Uighur dari bagian masyarakat terendah hingga kelompok *elite* (Martin, 2007: 141). Tiongkok berusaha memperlihatkan dengan jelas bahwa pendekatan kebijakan keamanan nasional utama yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk menanggulangi insurgensi adalah *hard power* dengan menggunakan *force* (kekuatan) yang terimplementasikan kedalam penggunaan militer (tentara), pasukan paramiliter, dan pasukan keamanan sipil (polisi). Meskipun demikian, pendekatan *hard power* bukanlah satu- satunya pendekatan yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk menanggulangi Insurgensi. pemerintah Tiongkok berusaha mengambil langkah fleksibel dalam menyesuaikan taktik mereka sesuai dengan spektrum kekerasan yang terjadi. Ketika level kekerasan yang ditimbulkan oleh insurgensi telah terkendali pemerintah Tiongkok melanjutkan dengan langkah pembentukan instrumen-instrumen masyarakat seperti menggunakan institusi-institusi akar rumput mulai dari tingkat pemimpin lokal hingga keluarga.

Tiongkok menggunakan kekuatan militer untuk menekan masyarakat dalam arti bukan dengan kekerasan secara langsung terhadap masyarakat, melainkan dengan menghadirkan kekuatan militer secara skala besar di Xinjiang, terutama di kota-kota tertentu yang dianggap strategis. Aktor yang menjalankan kebijakan Geostrategi Tiongkok dalam bentuk melawan insurgensi di Xinjiang adalah sebagai berikut:

- a. Militer/Tentara (*People's Liberation Army/PLA*) dikonsentrasikan di kota-kota kunci Xinjiang, terutama ibu kota provinsinya, Urumqi. Kekuatan infrantri (*ground forces*) PLA tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kekuatan pemerintahan Tiongkok, tetapi untuk tujuan-tujuan pertahanan (*defensif*) untuk menjaga perbatasan Tiongkok di sebelah Timur, mempertahankan ibu kota provinsi, mempertahankan populasi dan pusat-pusat industri, menjaga saluran komunikasi serta transportasi, dan menjaga keamanan internal.
- b. Paramiliter (*People's Armed Police*) tentara yang dirancang khusus untuk menertibkan masyarakat dan menjaga keamanan internal, juga untuk menangani kerusuhan. Di Xinjiang, polisi paramiliter ini dilengkapi dengan senjata otomatis dengan standar militer Tiongkok untuk menerapkan fungsi *Crowd Control* saat ada kerusuhan terjadi di wilayah Xinjiang, untuk mencegah adanya korban tidak bersalah yang meninggal, karena mempertahankan *Social Security* dan properti dari masyarakat sudah menjadi tugas dari PAP. potensi terjadinya kerusuhan ada kaitanya dengan strategi Insurgensi yang diterapkan TIM karena pemicu atau propaganda yang disebarakan TIM menjamur di kalangan masyarakat.
- c. Biro Keamanan Publik (seperti Biro Penyelidikan Federal/FBI di AS) untuk menyelidiki dan menggali informasi dengan para insurgen yang sudah tertangkap.
- d. Polisi, mata-mata, dan informan lokal di Xinjiang untuk masuk ke dalam akar rumput dan berinteraksi dengan masyarakat untuk mencari informasi dan alur jaringan insurgensi.

Tiongkok menerapkan apa yang disebut sebagai pertahanan empat lapis atau *four layers of defense*, yang terdiri dari kekuatan militer, termasuk Angkatan Darat dan Udara, polisi paramiliter, kelompok paramiliter, dan masyarakat Han yang dipaksa bermigrasi ke Xinjiang untuk menginfiltrasi masyarakat Xinjiang (Martin, 2007: 132). Pada dasarnya dengan geostrategi Tiongkok dengan mengerahkan kekuatan militer dalam skala besar di Xinjiang membuat ketakutan dan rasa percaya pada saat yang sama terhadap masyarakat Xinjiang, namun strategi inilah yang akan menjadi pencegahan sekaligus pemberantasan gerakan insurgensi TIM. Tiongkok menggunakan cara represif dalam skala massive menunjukkan bahwa Xinjiang ini merupakan daerah otonomi khusus yang berperan dalam kepentingan nasional Tiongkok. Militer yang menjaga Xinjiang dibagi dan dikhususkan untuk mendeteksi jaringan insurgensi serta pola dari penyebaran insurgensi TIM.

Pada saat insurgensi mulai bertempat di hati beberapa masyarakat Xinjiang, Tiongkok mengambil langkah untuk mencegah hal tersebut, di antaranya dengan membangun kembali institusi partai, pemerintahan, dan pasukan keamanan di tingkat akar rumput di Xinjiang. Dengan demikian, Tiongkok berhasil merebut kembali institusi-institusi vital pemerintahan di level lokal. Tiongkok memanfaatkan institusi-institusi sosial seperti keluarga, serikat pekerja, komunitas, dan hubungan pribadi, untuk membantu melawan insurgensi. Penggunaan institusi-institusi akar rumput untuk melawan insurgensi ini disebut juga sebagai *society-centric warfare* (Martin, 2007: 134). Pembangunan institusi-institusi akar rumput ini meningkatkan persepsi kekuatan negara dan tata kelola pemerintahan di kalangan masyarakat lokal di Xinjiang. Tiongkok membangun jaringan polisi di wilayah Xinjiang dan informan yang dapat beroperasi secara leluasa di Xinjiang. Implementasi yang mereka lakukan adalah menyusup dan mendekati individu maupun organisasi yang terkait dengan insurgensi. Kelompok Masyarakat, gerakan mahasiswa, dan perkumpulan berbagai jenis masyarakat lain ikut andil dalam pencegahan insurgensi dan penyebaran pengetahuan tentang bahaya Insurgensi TIM dan dampaknya terhadap mereka.

Partai Komunis Tiongkok satu-satunya partai yang memiliki struktur dan personel di seluruh lapisan wilayah akar rumput di Tiongkok (Martin, 2007: 32). Partai Komunis Tiongkok selalu mengutamakan penghancuran total untuk permasalahan terkait Insurgensi untuk upaya menjaga posisi dan keutamaan partai tersebut di dalam struktur negara dan masyarakat Tiongkok. Partai tersebut tidak akan membiarkan penghalang seperti Insurgensi memecah belah Tiongkok dan basis kekuasaan partai tersebut di Xinjiang. Langkah utama dari Partai Komunis Tiongkok adalah memvalidasi kepemimpinan mereka dengan cara memberikan dukungan penuh akan sumber daya untuk menghancurkan insurgensi TIM.

Tuntutan Masyarakat Xinjiang yang menuntut Stabilitas juga menjadi penting, karena kondisi Tiongkok memperbaiki kondisi taraf hidup masyarakatnya juga karena stabilitas yang dituntut adalah stabilitas domestik dan perkembangan politik ke arah yang menguntungkan masyarakat. Insurgensi TIM mengancam Tiongkok karena bertujuan untuk menunjukkan ketidakmampuan negara untuk mengelola ketidakpuasan masyarakat terkait stabilitas tersebut. Buktinya adalah banyaknya kerusuhan, kekacauan internal di masyarakat, dan aksi terror yang mengancam. Dengan demikian, kombinasi dari tujuan Partai Komunis untuk tetap memuncaki struktur negara dan masyarakat.

Kesimpulan

Geostrategi Tiongkok di Xinjiang merupakan sebuah langkah besar yang harus dilakukan Tiongkok untuk mencapai arti kedaulatan dari sebuah wilayah, khususnya wilayah Xinjiang yang merupakan daerah otonom khusus bagi Tiongkok. Geostrategi ini muncul sebagai strategi yang digunakan Tiongkok untuk menghadapi ancaman yang akan datang dan ancaman yang sudah datang. Geostrategi Tiongkok berhasil mencapai tujuannya dengan langkah yang dapat menghapus beberapa ancaman Terorisme. TIM (Turkestan Islamic Movement) yang berperan sebagai kelompok insurgensi mulai menyebar luas di wilayah Xinjiang dan mengancam salah satu daerah otonomi khusus yaitu Xinjiang.

Geostrategi Tiongkok sebagai kedua kekuatan tersebut untuk lebih menggali informasi tentang Gerakan Separatisme TIM yang merupakan Kelompok Terorisme sekaligus insurgensi. Kelompok TIM yang mengatas namakan etnis Uighur dengan tujuan untuk membuat Xinjiang sebagai negara dengan sistem Khalifah mengetahui bahwa jalur BRI CPEC menuju Pakistan merupakan salah satu jalur sutra terpenting bagi Tiongkok dapat terancam dan terhambat. Permasalahan Geostrategi Tiongkok terkait TIM (*Turkestan Islamic Movement*) di Xinjiang, dimana Geostrategi menggambarkan strategi Tiongkok dengan keterkaitannya Xinjiang sebagai wilayah otonomi khusus dan kerjasama SCO (Shanghai Cooperation Organization) sebagai perluasan dari geostrategi Tiongkok secara eksternal untuk menghadapi Gerakan TIM. Tim mengincar kelemahan dari Partai paling berkuasa di Tiongkok yaitu Partai Komunis Tiongkok, Namun dengan menggunakan *Counter Insurgency* dan *Society Centric War* dengan bantuan dari aktor-aktor Militer sebagai strategi untuk melawan Insurgensi dari TIM.

Penelitian ini mencakup bagaimana Geostrategi Tiongkok dapat diterapkan di wilayah Xinjiang ketika pada awal tahun 2013 terjadi kasus terorisme yang dibalut dengan insurgensi mulai meluas di wilayah Xinjiang hingga tahun 2019, dan dikaitkan dengan sisi sejarah dari Budaya, politik, dan ekonomi wilayah Xinjiang dan keterkaitannya dengan organisasi TIM. Geostrategi Tiongkok menunjukkan betapa pentingnya melawan aksi terorisme yang dibalut insurgensi di wilayah Xinjiang. Tiongkok sudah melakukan pendekatan soft power yang dimulai dari tatanan masyarakat akar rumput terbawah hingga kaum elite, dan menggunakan Hard Power sebagai bentuk Tiongkok memperkuat dan memperluas kekuatannya di seluruh wilayah Xinjiang agar masyarakat Xinjiang merasa aman dan ikut mencegah gerakan insurgensi.

Referensi

- Belle, Hann, I. (2002). "Temperamental Neighbours: Uighur-Han relations in Xinjiang, Northwest China" In G. Schlee (Ed.), *Imagined Difference: Hatred and the construction of identity*. Münster: LIT Verlag.
- Beina, Xu, Fletcher, Holly, Bajoria, Jayshree "The East Turkestan Islamic Movement (ETIM)" diperoleh dari : cfr.org, diakses pada 17 November 2019
- Blanchard, Ben "Syria Says up to 5000 Chinese Uighurs fighting in Millitant Groups," *Reuters*, May 11 ,2017, <http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-China-idUKKBN1840UP>
- Clarke, Michael, (2010). "China, Xinjiang and the Internationalisation of the Uyghur Issue", *Global Change. Peace & Security.*, Gruffith Asia Institute, p. 213-229
- Grygiel, Jakub (2006), "Great Power and Geopolitical Change"., Baltimore: The John Hopkins University Press p. 36-37
- Haas, De Marcel, Putten, Van Der, Paul Frans, (2007), "The Shanghai Cooperation Organisation : Towards a full-grown security alliance?" , The Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael

- Luft, G. (2016). "China's infrastructure play: why Washington should accept the new Silk Road". Foreign Affairs
- Lindsay Maizland, "China Repression of Uighurs in Xinjiang", diperoleh dari www.cfr.org , diakses pada 26 November 2019
- Mukhtari, Umar, "Ladang Gas Raksasa ditemukan di Xinjiang", diperoleh dari <https://republika.co.id/>, diakses pada 10 November 2019
- Reed, J. Todd and Raschke, Diana,(2010), "The TIM China's Islamic Militants and the Global Terrorist Threat", PRAEGER, www.abc-clio.com, United States of America
- Weitz, Richard. (2006), "Terrorism in Eurasia : Enhancing the Multilateral Response dalam China And Eurasia Forum Quarterly", Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program
- Wayne, M. I. (2007). "China's war on terrorism: Counter-insurgency, politics and internal security". Routledge.
- Yuxin, Li, et al, 2008. The Status Quo and Prospects of Regional Economic Cooperation between China's Xinjiang and Neighboring Countries under the Framework of the Shanghai Cooperation Organization.